

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA: PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGI-IDEOLOGI PENDIDIKAN

Muhammad Hasan

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan 90222

alamat e-mail: m.hasan@unm.ac.id

Abstrak: Keunggulan suatu bangsa tak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, modal manusia tersebut masih mengalami beberapa kendala khususnya yang terkait dengan pemerataan dan kualitas pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang aspek pembangunan dan pendidikan dalam perspektif ekonomi, khususnya dilihat dari aspek ideologi-ideologi pendidikan. Berdasarkan fenomena tersebut *education for all* perlu dikedepankan, suatu model pendidikan yang menekankan akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin, sehingga dalam penerapan pendidikan itu tidak ada diskriminasi.

Kata kunci: pembangunan, pendidikan, ideologi pendidikan, pendidikan untuk semua

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya sangat memengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Lebih lanjut, pendidikan yang memiliki empat pilar utama, yaitu belajar untuk belajar (*learning how to learn*), belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk menjadi (*learning how to be*), dan belajar untuk hidup dengan orang lain (*learning how to live together*), akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Ekonom Amerika Serikat, Jorgenson, *et al.* (1987) mempublikasikan temuan penelitiannya pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-79. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (*capital formation*), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi. Dari temuan tersebut meskipun modal manusia memegang peranan penting dalam pertumbuhan penduduk, para ahli mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan *engineering* lebih menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan teknologi.

Meskipun modal fisik dan kemajuan teknologi memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun peran modal manusia dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilupakan, karena semaju apapun modal fisik dan teknologi, jika modal manusia kurang diperhatikan, hal tersebut justru akan berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat.

Manusia, modal fisik, dan kemajuan teknologi, merupakan 3 aspek yang saling berinteraksi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat tiga hal utama dalam pembangunan suatu bangsa, yaitu menyangkut sumber daya manusia, teknologi dan dana. Ketiga faktor pokok tersebut merupakan masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah sumberdaya manusia semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Purwanto, 2006).

Salah satu aspek yang berkaitan erat dengan modal manusia adalah aspek pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia untuk menjadi insan yang paripurna, dewasa dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi (*long life education*).

Namun, jika dikaitkan dengan persoalan pembangunan, pengembangan modal manusia melalui pendidikan masih menghadapi berbagai macam masalah, yang

salah satunya adalah masih terdapatnya kesenjangan pendidikan yang disebabkan karena masih adanya kesenjangan antar daerah.

Kesenjangan antar daerah merupakan salah satu isu kebijakan yang sejak lama menjadi perhatian pemerintah. Meskipun tingkat kesenjangan antar wilayah semakin membaik, namun pemerintah masih perlu meningkatkan intervensi kebijakan untuk terus mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Makalah ini dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah tertinggal, serta upaya untuk mengatasinya berdasarkan persepektif ideologi-ideologi pendidikan.

PEMBAHASAN

2.1 Modal Manusia dan Ekonomi: Suatu Fakta Empirik

Kajian tentang keterkaitan antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi telah mendapatkan perhatian dari para ekonom dan pembuat kebijakan dan telah banyak dianalisis oleh para peneliti selama beberapa dekade terakhir. Teori awal mengenai hubungan ini berawal dari karya Mincer (1958), Schultz (1961) dan Becker (1962), yang percaya bahwa modal manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pelatihan dapat meningkatkan output dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, secara luas diterima bahwa modal manusia dapat dianggap sebagai salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi (lihat Mankiw et al., 1992; Barro, 2001), dan juga telah diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam memperkuat efek dari faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam teknologi (Romer, 1990; Aghion dan Howitt, 1998). Terdapat beberapa kajian yang menekankan peran modal

manusia dalam menjelaskan perbedaan pertumbuhan antar negara (Krueger dan Lindahl, 2001; Bassanini dan Scarpetta, 2002; Engelbrecht, 2003) dan lintas wilayah dalam negara (Cheshire dan Magrini, 2000; Fingleton, 2004).

Selama bertahun-tahun telah dilakukan penelitian ekstensif yang meneliti tentang kontribusi modal manusia dalam proses pertumbuhan ekonomi. Barro (1991) menemukan bahwa tingkat pendidikan dasar dan menengah memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Barro dan Sala-i-Martin (1995) menemukan bahwa rata-rata tahun sekolah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap output ekonomi. Dengan menerapkan analisis input-output Jorgenson et al., (2003) mempelajari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama periode 1977-2000 dan mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat didominasi oleh investasi dalam informasi dan pendidikan tinggi. Bloom et al., (2004) mencoba untuk menyelidiki dampak modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, mereka menemukan bahwa tingkat pendidikan dan harapan hidup memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Musibau dan Rasak (2005) telah mempelajari hubungan jangka panjang antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Mereka telah menggunakan dua saluran untuk menguji pentingnya modal manusia untuk pertumbuhan ekonomi. Di saluran pertama, modal manusia digunakan sebagai faktor independen produksi dan di saluran kedua; modal manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui parameter teknologi. Menurut temuan mereka, tenaga kerja terdidik dengan baik secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kedua saluran tersebut.

2.2 Masalah Pembangunan Pendidikan Daerah Terpencil

Sauri (2008), menyatakan bahwa kondisi objektif dunia pendidikan dewasa ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan mendasar, permasalahan tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat permasalahan utama, yaitu; Pertama, terkait dengan kualitas pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni proses pembelajaran yang masih konvensional, kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, jumlah dan kualitas buku di sekolah yang belum memadai. Kedua, pemerataan pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas, keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung, serta kekurangan tenaga guru. *Ketiga*, efisiensi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni penyelenggaraan otonomi pendidikan yang belum optimal (MBS belum optimal), keterbatasan anggaran (kemampuan pemerintah yang terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat), dan mutu SDM pengelola pendidikan. *Keempat*, relevansi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi daerah, serta kecakapan hidup (*life skill*) yang dihasilkan belum optimal.

Apabila melihat keempat permasalahan tersebut, hampir keseluruhannya dialami oleh daerah tertinggal. Apabila mencermati interaksi antara pembukaan UUD 1945 alinea keempat, UUD 1945 pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5, maka sangat jelas dan tegas bahwa eksistensi pendidikan itu untuk semua artinya untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecualinya. Namun, secara realita hal tersebut belum terwujud karena masih banyak ditemukan berbagai kasus

pembangunan pendidikan yang kurang optimal khususnya di daerah terpencil.

Hasil kajian Vito, dkk (2015), A'ing (2015), Suardi, dkk (2016) menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di daerah terpencil masih menghadapi masalah susah aksesnya menuju sekolah, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, dan jumlah tenaga pengajar yang tidak memadai.

2.3 Pendidikan untuk Semua: Suatu Strategi untuk Mengatasi Permasalahan

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang terkait dengan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal, maka penulis mencoba mengajukan suatu strategi yang berdasarkan pada pendidikan untuk semua (*education for all*). Ki Hajar Dewantara (1977), merumuskan pengertian pendidikan yang berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya. Selanjutnya payung hukum atau asas legalitas tentang konsepsi pendidikan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari kedua definisi tersebut, hakikat dari pendidikan untuk semua mulai tergambar,

yaitu mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan. Hal ini juga sebagai upaya memenuhi amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 5, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan pendidikan untuk semua tertuang di dalam asas Taman Siswa. Adapun asas-asas Taman siswa adalah menjadi hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan, pengajaran harus membimbing anak menjadi manusia yang merdeka, pendidikan harus didasarkan atas kebudayaan bangsa sendiri tanpa mengesampingkan kebudayaan bangsa-bangsa lain, pendidikan harus merata untuk seluruh rakyat, Taman siswa harus hidup dan berkembang dengan kekuatan sendiri, dan pendidik harus berhamba pada anak atas dasar sikap tanpa pamrih.

Jika dikaitkan dengan salah satu asas Taman Siswa, yaitu pendidikan harus merata bagi seluruh rakyat, konsep pendidikan untuk semua yang dikembangkan aliran post modernisme perlu mendapatkan perhatian, khususnya untuk mengatasi persoalan pemerataan pendidikan. Pada mulanya, gerakan postmodernisme muncul sebagai kritik atas kegagalan kehidupan modernitas dalam menciptakan situasi sosial yang lebih baik, kondusif dan berkeadilan sosial (Ritzer, 2003). Hal ini dikarenakan filsafat posmodernisme memiliki anggapan bahwa modernisme membuat manusia kehilangan individualitas, kemandirian, dan konsep diri.

Post-modernisme merupakan paham yang menolak modernisme, karena modernisme menganggap adanya kebenaran yang universal bagi semua manusia. Sedangkan aliran postmodernisme menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang universal bagi semua manusia. Berdasarkan

dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan tidak lagi dipahami sebagai suatu proses mentransfer ilmu yang hanya dapat dilakukan di sekolah. Guru tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Guru berperan sebagai pembelajar dan juga praktisi. Guru juga harus mampu membimbing anak untuk mampu mengemban tanggung jawab sosial maupun pribadi. Praktek-praktek pendidikan tidak harus dilakukan di sekolah, melainkan juga diperankan oleh masyarakat melalui alternatif pendidikan lain maupun pendidikan-pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Tujuan pendidikan menurut postmodernisme adalah mengembangkan identitas siswa yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak asasi dan melawan ketidakadilan.

Dalam konteks lainnya, aliran Marxisme juga memiliki pandangan tersendiri, terkait dengan konsep pendidikan untuk semua. Aliran Marxisme dalam filsafat pendidikan berpendapat bahwa baik kaum buruh maupun kaum pemilik modal, kedua-duanya berhak mendapatkan pendidikan yang layak guna membantu mereka manusia meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Marxisme menghendaki perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme dimana setiap orang mendapatkan hak yang sama, tidak ada marjinalitas. Marxisme menolak strata sosial yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut berimplikasi pada pengertian bahwa setiap lapisan masyarakat hendaknya mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan setara. Sehingga tujuan dari pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia dapat tercapai (Ismail dan Basir, 2012).

Seorang pendidik menurut aliran marxisme adalah mereka yang berpendidikan dan mengajarkan pendidikan kepada peserta didik agar taraf hidup manusia meningkat, marxisme mengkritik pendidik yang

mempertahankan status quo mereka dalam melakukan pengajaran kepada peserta didik. Sedangkan peserta didik menurut marxisme adalah mereka yang berasal dari kaum buruh maupun dari kaum pemilik modal yang mendapat materi dan pendidikan yang setara dan juga adil. Dalam pandangan Marx, sistem pendidikan itu keliru jika hanya melakukan pengajaran dan pendidikan hanya untuk memenuhi kepentingan orang-orang borjuis sedangkan dari kaum proleter tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana seharusnya. Dalam pendidikan yang menganut filsafat pendidikan marxisme, tujuan pendidikan adalah membangun karakter manusia yang unggul, suatu kondisi mental yang dibutuhkan untuk membangun suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan berpihak pada kaum yang tertindas. Tujuan pendidikan yang lain menurut Marxisme adalah masyarakat harus beralih dari kapitalisme ke sosialisme, membentuk sebuah kesadaran sosialis dan masyarakat sosialis serta berupaya ini meningkat dengan memberikan pendidikan untuk mengembangkan kesadaran sosialis pada manusia.

Berdasarkan perspektif teoritis tersebut, maka rekomendasi yang layak dikedepankan untuk mengatasi permasalahan pembangunan pendidikan di daerah terpencil adalah

1. Pemerintah semestinya lebih meningkatkan prioritas pembangunan bidang pendidikan mengingat permasalahan pendidikan di Indonesia masih relatif besar dengan belum tercapainya target pendidikan dasar untuk semua. Strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan alokasi APBN dan APBD untuk bidang pendidikan;
2. Pemerintah juga nampaknya melibatkan masyarakat dalam pembiayaan Wajib Belajar 9 Tahun. Akibatnya pendidikan dasar di Indonesia mahal karena subsidi

pemerintah yang rendah, dan orang tua siswa harus menanggung biaya yang besar. Dalam kondisi seperti ini, lapisan masyarakat yang paling miskin akan mengalami kesulitan. Mengingat permasalahan ini, maka rekomendasi yang ditawarkan pemerintah hendaknya membuat peraturan tentang perpanjangan masa pakai buku pelajaran dan meningkatkan penyediaan buku pelajaran oleh pemerintah yang gratis;

3. Perbaikan infrastruktur pendidikan adalah kebutuhan mendesak, mulai dari gedung sekolah, jembatan, jalan beserta fasilitas lainnya.
4. Mendesak lembaga donor dan perusahaan multinasional untuk turut berperan dalam mewujudkan program *Education for All*. Untuk perusahaan multinasional misalnya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

KESIMPULAN

Education for All adalah suatu model pendidikan tanpa membedakan strata sosial, etnis, budaya, agama dan lainnya. Model pendidikan ini berbasis egaliterian, karena dalam implementasinya tidak didasarkan pada stratifikasi sosial, semuanya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Konsep *Education for All* berarti suatu model pendidikan yang menekankan akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin, sehingga dalam penerapan pendidikan itu tidak ada diskriminasi. Adanya *Education for All* diharapkan bisa membantu masyarakat yang kurang beruntung agar bisa mengenyam pendidikan.

Pendidikan seharusnya menjadi skala prioritas bagi agenda pembangunan pemerintah daerah. Melalui percepatan pembangunan pendidikan yang menyentuh

segala aspek dan dinamika pendidikan diharapkan akan mampu mengangkat kualitas pendidikan di daerah. Pembangunan pendidikan di daerah harus bersifat adil, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan mutu yang ada saat ini dapat diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dan sedang diluncurkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, semuanya itu tujuannya hanya pada upaya pencapaian tingkat kualitas pendidikan. Walaupun di satu sisi, untuk mengatasi ketertinggalan mutu pendidikan suatu daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri, namun pemerintah pusat lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi.

REFERENSI

- Aghion, P., & Howitt, P. (1998). *Endogenous Growth Theory*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- A'ing, Aylin. (2015). Studi tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2015, 3 (4): 545-559 ISSN: 2337-8670.
- Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(425), 407-43.
- Barro, R., & Sala-i-Martin, X. (1995). *Economic Growth*. New York: McGraw-Hill.
- Barro, R. J. (2001). Human Capital and Growth. *American Economic Review*, 91, 12-17.
- Bassanini, A., & Scarpetta, S. (2002). Does Human Capital Matter for Growth in OECD Countries? A Pooled Mean-Group Approach. *Economics Letters*, 74, 399-405.
- Becker, Gary S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. *Journal of Political Economy*, 70 (Supplement), 9-49.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The Effects of Health on Economic Growth: A Production Function Approach. *World Development*, 1-13.
- Dewantara, Ki Hajar. (1977). Ki Hajar Dewantara: Bagian I. Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Engelbrecht, H. (2003). Human Capital and Economic Growth: Cross-Section Evidence for OECD Countries. *Economic Record*, 79, 40-51.
- Fingleton, B. (2004). Some Alternative Geo-Economics for Europe's Regions. *Journal of Economic Geography*, 4, 389-420.
- Ismail, Indriaty; Basir, Mohd. Zuhaili Kamal. (2012). Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial. *International Journal of Islamic Thought Vol. 1: June, 2012*.
- Jorgenson, D. W.; Gollop, F. M.; Fraumeni, B. M. (1987). *Productivity and U.S. Economic Growth*. Cambridge: Harvard University Press.
- Jorgenson, D. W., Mun, S. H., & Kevin, J. S. (2003). Growth of US Industries and Investments in Information Technology and Higher Education. *Economic Systems Research*, 15, 279-325.
- Krueger, A. B., & Lindahl, M. (2001). Education and Growth: Why and for Whom? *Journal of Economic Literature*, 39, 1101-1136.
- Mankiw, N.G., Romer, D., & Weil, D.N. (1992). A Contribution to The Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107, 407-437.
- Mincer, Jacob. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. *Journal of Political Economy*, 66(4), 281-302.
- Musibau, B. A., & Rasak, A. A. (2005). Long Run Relationship between Education and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Johansen's

- Cointegration Approach. Cornel University, Dakar - Senegal.
- Purwanto, Nurtanio Agus. (2006). Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara. *Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 02: Oktober, 2006*.
- Ritzer, George. (2003). *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics*. New York: McGraw-Hill.
- Romer, P. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98, S71-S102.
- Sauri, Sofyan. (2008). Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu. *Makalah, tidak dipublikasikan*.
- Schultz, Theodore W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51, 1-17.
- Suardi, Firdaus; Sulfasyah; Hanis, Nur. (2016). Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. IV No. 2 November 2016, ISSN e-2477-0221 p-2339-2401.
- Vito, Benediktus; Hetty Krisnani; Risna Resnawaty. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. *Prosiding KS: Riset & PKM, Vol: 2, No. 2, Hal: 147 – 300, ISSN: 2442-4480*.